

INOVASI SOSIAL KAHURIPAN KAMOJANG SEBAGAI KATALIS PENGHIDUPAN LESTARI BERJANGKA PANJANG

Dito Hastha Krisandy¹, Rifky Taufiq Fardian², Ahsani Paramitasari³, Fahmi Ghozali⁴

¹Officer Community Development PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang

^{2,3,4}Community Development Officer PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang

Email: dito.krisandy@plnindonesiapower.co.id

ABSTRACT

The increasing pace of economic activities that drives regional development often places communities in both urban and rural areas in a dilemma between improving economic well-being and preserving the environment. This condition is reflected in Kamojang Hamlet, Laksana Village, Ibum District, Bandung Regency, where challenges persist in waste management, limited waste management infrastructure, low levels of community participation, and the underutilization of economic residuals that could serve as productive resources. This study aims to analyze the social innovation process embedded in the KAHURIPAN Kamojang Program (*Kawasan Hijau Integrasi Pengelolaan Lingkungan Kamojang*), initiated by PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang, Kamojang–Darajat Geothermal Power Plant, in response to various social, economic, and environmental issues. Employing a qualitative approach, the study examines the six stages of social innovation: *prompts, proposals, prototypes, sustaining, scaling, and systemic change*. The findings reveal that the KAHURIPAN Kamojang Program has progressively implemented these stages through integrated waste management, the utilization of residual products for integrated farming, environmental conservation initiatives, and the development of community-based enterprises within a unified empowerment ecosystem. The program has successfully fostered systemic changes across social, economic, environmental, and community welfare dimensions. Therefore, social innovation grounded in the principles of the circular economy holds significant potential as an effective community empowerment strategy for promoting inclusive, adaptive, and sustainable development.

Keywords: Social Innovation, Circular Economy, Community Empowerment.

ABSTRAK

Peningkatan aktivitas perekonomian yang mendorong pertumbuhan wilayah sering kali dihadapkan masyarakat pada dilema antara peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kondisi ini tercermin di Dusun Kamojang, Desa Laksana, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, yang masih menghadapi permasalahan pengelolaan sampah, keterbatasan infrastruktur persampahan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan residu kegiatan ekonomi sebagai sumber daya produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses inovasi sosial dalam Program KAHURIPAN Kamojang (*Kawasan Hijau Integrasi Pengelolaan Lingkungan Kamojang*) yang diinisiasi oleh PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang UP PLTP Kamojang–Darajat sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis enam tahapan inovasi sosial, yaitu *prompts, proposals, prototypes, sustaining, scaling, dan systemic change*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KAHURIPAN Kamojang telah mengimplementasikan tahapan inovasi sosial secara bertahap melalui integrasi pengelolaan sampah, pemanfaatan residu untuk pertanian terpadu, kegiatan konservasi lingkungan, dan pengembangan usaha masyarakat dalam satu ekosistem pemberdayaan. Program ini terbukti mampu mendorong perubahan sistemik pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, inovasi sosial berbasis ekonomi sirkular memiliki potensi besar sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Inovasi Sosial, Ekonomi Sirkular, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Dewasa ini pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan global dan nasional. Namun demikian, berbagai wilayah di Indonesia baik

urban maupun rural masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan aspek lingkungan hidup. Salah satu persoalan yang semakin mengemuka

adalah meningkatnya timbulan sampah sebagai konsekuensi dari pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Persoalan ini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga mulai menjadi tantangan serius di wilayah perdesaan yang kerap kali dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan kapasitas pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, persoalan lingkungan perlu ditangani secara terpadu agar agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan tersebut. Sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang relatif terus meningkat, Kabupaten Bandung menghasilkan timbulan sampah yang relatif tinggi setiap tahunnya. Dari sisi ekonomi, Kabupaten Bandung menunjukkan kinerja yang positif dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai lebih dari Rp143 triliun pada tahun 2022 atau meningkat sekitar 9,6% dari tahun 2021 (BPS Kab Bandung, 2025). Kontribusi tersebut bahkan mencapai 0,73% terhadap total PDRB Nasional (BPS, 2023), hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam aktivitas perekonomian regional maupun nasional.

Grafik 1. Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan Tren Timbulan Sampah Kab. Bandung



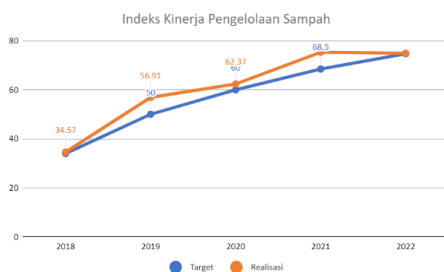
Sumber: BPS Kab Bandung, 2025; Pemerintah Kabupaten Bandung, 2025, diolah.

Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan residu lingkungan berupa timbulan sampah. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bandung (2025) pada tahun 2022, volume timbulan sampah mencapai 468.351,94 ton per tahun, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 462.939,17 ton per tahun. Angka tersebut berkontribusi sekitar 1,24% terhadap total timbulan sampah nasional yang mencapai 37.667.251 ton per tahun (Ardiansyah, 2025). Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan total timbulan sampah mencapai 475.058,82 ton per tahun atau setara dengan 1.301,53 ton sampah per hari (Pemerintah Kabupaten Bandung, 2025).

Pada kenyataannya peningkatan timbulan sampah tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas pengelolaan yang memadai. Data DLH Kab Bandung (2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 volume sampah yang berhasil ditangani baru mencapai sekitar 144.445,83 ton per tahun atau sekitar 30,4% dari total timbulan sampah. Sementara itu, volume sampah yang berhasil dikelola mencapai 385.212,08 ton per tahun atau sekitar 81,09%. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan kapasitas layanan pengelolaan yang tersedia di Kabupaten Bandung, yakni sebesar 257 ton per hari (BP Cekungan Bandung, 2024). Sayangnya, ditengah peningkatan volume timbulan sampah, capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung pada tahun 2022 justru mengalami penurunan sebesar 0,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal, pada tahun 2019 capaian indeksnya mampu meningkat sebanyak 64,62%

dibandingkan pada tahun 2018 (DLH Kabupaten Bandung, 2024)

Grafik 2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung



Sumber: DLH Kabupaten Bandung, 2024, diolah.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2023) mayoritas komposisi sampah di Kabupaten Bandung didominasi oleh sampah organik yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali melalui pendekatan ekonomi sirkular. Namun, keterbatasan infrastruktur dan sistem pengelolaan menyebabkan potensi tersebut belum dapat dioptimalkan. Akibatnya, peningkatan aktivitas ekonomi yang seharusnya menciptakan kesejahteraan justru menghasilkan residu yang terus menambah tekanan terhadap lingkungan. Kondisi inilah yang memperlihatkan adanya dilema ekonomi-ekologi di Kabupaten Bandung, dimana pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan meningkatnya tantangan pengelolaan lingkungan yang memerlukan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Permasalahan pengelolaan sampah tersebut juga terjadi pada tingkat lokal di Kecamatan Ibum. Data DLH Kabupaten Bandung (2024) menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kecamatan Ibum mencapai 32,57 ton per hari atau berkontribusi sekitar 2,5% terhadap total timbulan sampah Kabupaten Bandung. Meskipun

jumlah timbulan sampah tersebut relatif besar, kapasitas pengelolaan yang tersedia masih tergolong terbatas. Data DLH Kabupaten Bandung (2025) menunjukkan bahwa Kecamatan Ibum hanya memiliki 4 unit TPS3R atau sekitar 2,31% dari total 173 TPS3R yang tersedia di Kabupaten Bandung. Selain itu, sarana pengangkutan sampah yang tersedia hanya terdiri atas 3 unit kendaraan roda tiga dan 13 unit gerobak sampah untuk melayani seluruh wilayah kecamatan (DLH Kabupaten Bandung, 2024).

Keterbatasan infrastruktur tersebut menunjukkan bahwa kapasitas layanan pengelolaan sampah di Kecamatan Ibum belum sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Kondisi ini diperparah dengan indikasi bahwa Kecamatan Ibum belum tercakup dalam jangkauan layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (DLH Kabupaten Bandung, 2024). Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan juga menunjukkan kecenderungan penurunan, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Data Kecamatan Ibum (2025) menunjukkan bahwa jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan menurun dari 100 peserta pada tahun 2021 menjadi hanya 35 peserta pada tahun 2022 atau turun sekitar 65%. Bahkan sejak tahun 2023 hingga 2024 tidak tercatat lagi kegiatan sosialisasi yang melibatkan peserta masyarakat.

Keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan Ibum pada akhirnya berimplikasi secara langsung terhadap kondisi pengelolaan sampah di tingkat desa.

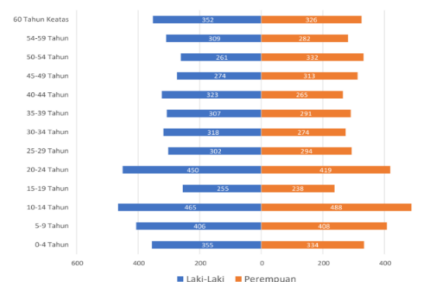
Salah satu wilayah yang menghadapi tantangan tersebut adalah Desa Laksana, yang merupakan desa di sekitar wilayah operasional PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang UP PLTP Kamojang-Darajat. Sebagai bagian dari Kecamatan Ibum, Desa Laksana turut menghadapi tekanan akibat meningkatnya timbulan sampah, sementara kapasitas pengelolaan yang tersedia masih relatif terbatas.

Pada tahun 2023, penduduk Desa Laksana diperkirakan menghasilkan timbulan sampah sebesar 3,07 ton per hari atau sekitar 9,42% dari total timbulan sampah harian Kecamatan Ibum (DLH Kabupaten Bandung, 2024; BPS Kabupaten Bandung, 2024, diolah). Namun demikian, kapasitas pengelolaan sampah yang tersedia masih sangat terbatas. Bank sampah tingkat desa tercatat hanya mampu mengelola sekitar 4,23 ton sampah per tahun atau setara dengan rata-rata 0,011 ton per hari (Hayati, dkk, 2020). Dengan demikian, volume sampah yang berhasil dikelola melalui bank sampah baru mencapai sekitar 0,36% dari total estimasi timbulan sampah harian Desa Laksana. Selain itu, dukungan sarana pengangkutan sampah juga masih terbatas, data DLH Kab Bandung (2023) menunjukkan jika Desa Laksana hanya memperoleh alokasi satu unit gerobak sampah untuk pelayanan pengumpulan sampah masyarakat.

Tantangan pengelolaan sampah di Desa Laksana juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan demografi masyarakat. Sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan relatif rendah, dimana sekitar 80,57% warga merupakan lulusan sekolah dasar atau di bawahnya (Irwansyah, dkk, 2024). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sehingga dibutuhkan strategi edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Diagram 1. Piramida Penduduk Desa Laksana



Sumber: Irwansyah, 2024, diolah.

Di sisi lain, Desa Laksana memiliki modal sosial yang potensial untuk mendukung pengembangan program berbasis masyarakat. Nilai penghormatan terhadap tokoh masyarakat dan kelompok usia yang lebih tua masih kuat dalam kehidupan sosial masyarakat (Yayasan Get Plastic Indonesia, 2025). Karakteristik ini membuka peluang bagi pengembangan model pengelolaan lingkungan yang melibatkan kelompok lanjut usia sebagai agen perubahan di tingkat komunitas.

Potensi tersebut semakin relevan mengingat Desa Laksana memiliki populasi lansia yang cukup besar, yaitu sekitar 678 jiwa (Irwansyah, dkk, 2024). Dengan pengalaman, pengaruh sosial, dan kedekatan mereka dengan masyarakat, kelompok lansia berpotensi menjadi aktor penting dalam mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah sekaligus memperoleh ruang partisipasi yang lebih produktif dalam pembangunan desa.

Gambaran permasalahan pengelolaan sampah di Desa Laksana terlihat lebih jelas pada tingkat dusun, khususnya di Dusun Kamojang

yang kemudian menjadi lokasi utama pengembangan Program KAHURIPAN Kamojang. Berdasarkan temuan Yayasan Get Plastic Indonesia (2025) Dusun Kamojang menghadapi persoalan sampah yang cukup serius dengan estimasi timbulan sampah mencapai 0,975 ton per hari atau setara dengan 31,75% dari total timbulan sampah harian Desa Laksana. Besarnya volume sampah tersebut menunjukkan bahwa masalah sampah di tingkat desa banyak terkonsentrasi di wilayah Dusun Kamojang.

Berdasarkan sektor produsen sampah, Yayasan Get Plastic (2025) mengonfirmasi bahwa sekitar 0,65 ton sampah per hari berasal dari sektor domestik, sedangkan 0,325 ton per hari berasal dari aktivitas wirausaha masyarakat. Dari sisi komposisi, timbulan sampah didominasi oleh sampah organik yang mencapai sekitar 82%, sementara sisanya terdiri atas sampah anorganik sebesar 12% dan jenis sampah lainnya. Dominasi sampah organik tersebut menunjukkan adanya potensi besar untuk pengembangan model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali residu organik menjadi produk yang bernilai ekonomi.

Persoalan sampah di Dusun Kamojang tidak hanya ditunjukkan oleh tingginya volume timbulan sampah, tetapi juga terlihat dari masih ditemukannya beberapa titik penumpukan sampah di lingkungan sekitar. Hasil pemetaan mengidentifikasi sedikitnya empat lokasi yang menjadi titik akumulasi sampah warga, yaitu; (1) persawahan Dusun Kamojang, (2) kawasan wisata Siangar Kamojang, (3) area pembibitan kopi Kamojang, serta (4) kawasan hutan konservasi BKSDA (Yayasan Get Plastic, 2025). Keberadaan titik-titik penumpukan tersebut

menunjukkan bahwa sebagian sampah masih belum terkelola secara optimal dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan maupun kawasan konservasi.

Di sisi lain, kapasitas pengelolaan sampah yang tersedia masih relatif terbatas. Dusun Kamojang hanya memiliki satu unit TPS3R dengan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, yaitu sekitar 3,47% atau 20 kepala keluarga dari total 575 kepala keluarga yang ada (Yayasan Get Plastic Indonesia, 2025). Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan perilaku masyarakat.

Meskipun demikian, Dusun Kamojang memiliki berbagai modal sosial yang dapat menjadi pondasi dalam pengembangan solusi berbasis masyarakat. Kepemimpinan kepala dusun yang kuat, budaya *kaloka cari* (gotong royong) yang masih terjaga, serta tingginya penghormatan masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang lebih tua menjadi aset sosial yang penting dalam mendorong perubahan perilaku kolektif. Selain itu, berbagai inisiatif lokal seperti program Sedekah Sampah yang telah tumbuh menunjukkan adanya kesadaran awal masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan. Modal tersebut semakin diperkuat oleh Potensi integrasi dengan jaringan kelompok masyarakat lain yang aktif (KWT, KUM, KTH, Kamojang Pesat) untuk membangun rantai ekonomi potensial baru.

Kombinasi antara tingginya permasalahan sampah, rendahnya tingkat pengelolaan, serta keberadaan modal sosial dan potensi kelembagaan masyarakat tersebut

kemudian menjadi titik awal lahirnya Program KAHURIPAN Kamojang. Program yang dirancang tidak hanya untuk mengurangi timbulan sampah, tetapi juga untuk mentransformasikan limbah yang sebelumnya dipandang sebagai masalah lingkungan menjadi sumber daya produktif yang mampu menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berbeda dengan pendekatan pengelolaan sampah konvensional yang berorientasi pada pengurangan volume sampah semata, Program KAHURIPAN Kamojang mengedepankan pendekatan inovasi sosial yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama perubahan. Dalam konteks ini, sampah dan residu produksi tidak lagi dipandang sebagai beban lingkungan, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kawasan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini membahas proses pengembangan inovasi sosial dalam Program KAHURIPAN Kamojang yang diinisiasi oleh PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang UP PLTP Kamojang-Darajat di Dusun Kamojang, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Program ini dikembangkan melalui pendekatan ekonomi sirkular yang mengintegrasikan pengelolaan sampah, pertanian terpadu, konservasi lingkungan, serta pengembangan usaha masyarakat ke dalam suatu ekosistem pemberdayaan yang saling terhubung.

Sejalan dengan lingkup pembahasan penelitian tersebut, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang kompleks, terperinci, dan

pembelajaran pada situasi yang dialami (Murdiyanto, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengalaman para aktor yang terlibat, interaksi antar pemangku kepentingan, serta konteks sosial yang melatarbelakangi perkembangan inovasi sosial di kawasan Kamojang. Studi ini memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam serta data sekunder yang bersumber dari catatan perusahaan, mitra binaan, dan literatur ilmiah. Menurut Murdiyanto (2020), data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui perantara atau dokumen yang telah disusun oleh pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

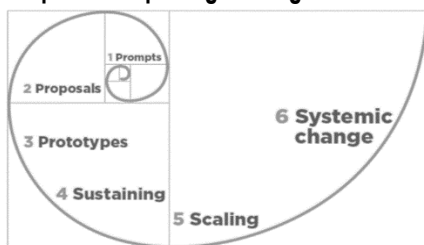
Program KAHURIPAN Kamojang (Kawasan Hijau Integrasi Pengelolaan Lingkungan Kamojang) lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat di sekitar wilayah *ring 1* PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang UP PLTP Kamojang-Darajat. Hasil pemetaan sosial oleh perusahaan menunjukkan adanya sejumlah kelompok rentan yang belum sepenuhnya terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif, khususnya kelompok lanjut usia (lansia) yang memiliki keterbatasan akses terhadap peluang usaha dan sumber penghidupan. Di sisi lain, berbagai aktivitas ekonomi masyarakat masih menghasilkan residu berupa limbah organik maupun anorganik yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga berpotensi menjadi beban ekologis bagi kawasan.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh adanya dilema pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan ketika diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Aktivitas ekonomi sering dipersepsikan sebagai faktor yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, sementara upaya konservasi dianggap membatasi peluang peningkatan pendapatan masyarakat karena adanya kebutuhan domestik yang harus disiasati.

Akibatnya, perlindungan lingkungan kerap diposisikan sebagai pengorbanan yang harus dilakukan demi menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Cara pandang yang bersifat dikotomis ini tidak hanya membatasi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, tetapi juga menghambat munculnya inovasi yang mampu menghubungkan tujuan ekonomi dan lingkungan secara bersamaan.

Berangkat dari kondisi tersebut, Program KAHURIPAN Kamojang dikembangkan sebagai antitesis yang berupaya mentransformasikan hubungan antara ekonomi dan lingkungan dari yang semula dipandang saling bertentangan menjadi saling menguatkan. Melalui desain program inovasi sosial, residu dari suatu aktivitas ekonomi diposisikan kembali sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan nilai ekonomi baru, memperluas peluang usaha bagi kelompok rentan, sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan.

Gambar 1. Spiral Tahap Pengembangan Inovasi Sosial



Sumber: Caulier-Grice, et al., 2012

Pembahasan pengembangan inovasi sosial pada Program KAHURIPAN Kamojang dalam artikel ini mengikuti tahapan *Social Innovation Spiral* yang dikembangkan oleh Caulier-Grice et al. (2012), yang terdiri atas enam tahapan, yaitu *prompts*, *proposals*, *prototypes*, *sustaining*, *scaling*, dan *systemic change*. Kerangka analisis ini digunakan untuk memahami proses inovasi sosial secara utuh, mulai dari identifikasi masalah hingga terjadinya perubahan sistemik yang berkelanjutan pada masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, inovasi sosial dipahami bukan hanya sebagai penciptaan solusi baru,

melainkan sebagai proses transformasi sosial yang mampu mengubah tata kehidupan secara berkelanjutan.

Pertama, tahap *prompts* merupakan fase awal dalam pengembangan inovasi sosial yang berfokus pada identifikasi kelompok rentan, permasalahan sosial yang menjadi isu krusial, serta potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai solusi. Tahap ini menjadi fondasi penting karena menentukan arah intervensi yang akan dirancang pada tahapan berikutnya.

Dalam rangka memastikan tahapan ini memperoleh hasil yang representatif, PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang UP PLTP Kamojang-Darajat melakukan serangkaian kegiatan observasi interaktif, salah satunya melalui kegiatan pemetaan sosial yang dilaksanakan pada tahun 2022. Pemetaan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas mengumpulkan sekaligus memetakan data dan informasi terkait potensi, kebutuhan, serta dinamika permasalahan yang tengah dihadapi oleh komunitas lokal (Chambers, 1992, sebagaimana dikutip dalam Gunawan & Sutrisno, 2021). Berdasarkan hasil pemetaan sosial yang dilakukan di wilayah Kamojang, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan kepemilikan aset sekaligus akses terhadap sumber penghidupan yang stabil. Sebagian besar kelompok sasaran bekerja sebagai buruh tani dan petani kecil dengan kepemilikan lahan terbatas sehingga pendapatan rumah tangga sangat bergantung pada musim dan fluktuasi hasil panen. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat rentan terhadap tekanan ekonomi, termasuk ketergantungan pada skema pinjaman informal yang memperburuk kondisi finansial rumah tangga. Selain buruh tani dan petani miskin, sejumlah kelompok rentan yang teridentifikasi pada tahapan ini juga meliputi janda, lansia, dan rumah tangga miskin. Rendahnya keterampilan usaha dan keterbatasan akses terhadap teknologi menyebabkan kelompok-kelompok tersebut belum mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal secara maksimal.

Selain dihadapkan pada permasalahan ekonomi, kawasan Kamojang juga menghadapi berbagai tantangan di bidang lingkungan berupa timbunan sampah rumah tangga yang mencapai sekitar 0,975 ton per hari (Yayasan Get Plastic Indonesia, 2025), hal ini diperparah oleh praktik *open dumping* dan *open burning* yang masih dilakukan oleh sebagian besar penduduk. Limbah pertanian juga belum dimanfaatkan secara optimal sehingga menghilangkan potensi nilai tambah ekonomi. Di sisi lain, Kamojang terletak pada daerah rawan bencana longsor (Widagdhaprasana, M., 2025), hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi ekonomi semata tetapi juga memperhatikan aspek konservasi lingkungan.

Pemetaan sosial juga menunjukkan bahwa masyarakat Kamojang memiliki modal sosial yang kuat. Budaya gotong royong masih terpelihara dengan baik dan menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Hasil pemetaan sosial mengonfirmasi bahwa tingkat partisipasi gotong-royong masyarakat mencapai 87%. Kawasan Kamojang juga memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, mulai dari komoditas kopi, pertanian hortikultura, budidaya jamur, perikanan, hingga potensi wisata alam.

Sejumlah temuan pada tahapan *prompts* di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat Kamojang bukan semata-mata persoalan kemiskinan atau lingkungan secara terpisah, melainkan persoalan sistemik yang saling berkelindan. Oleh karena itu, perusahaan menyadari bahwa solusi yang dibutuhkan harus mampu menghubungkan potensi sosial, ekonomi, dan lingkungan ke dalam satu sistem yang saling mendukung.

Kedua, tahap *proposals* merupakan proses penyusunan strategi inovasi sosial berdasarkan hasil identifikasi masalah dan potensi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang UP PLTP Kamojang-Darajat bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lokal

melaksanakan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan partisipatif dipilih untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam proses perencanaan program. Partisipasi aktif dari komunitas lokal dilakukan untuk mengeskalisasi kesadaran sekaligus menumbuhkan *sense of belonging*. Melalui pendekatan partisipatif ini, masyarakat tidak sekadar menjadi objek melainkan subjek yang merasa memiliki dan mengemban tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan dari program yang diimplementasikan (Wulandari dkk., 2023, sebagaimana dikutip dalam Nuryana dkk., 2025). Melalui mekanisme ini, masyarakat secara aktif menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi sekaligus menawarkan gagasan mengenai bentuk pengembangan kawasan yang diinginkan.

Hasil proses perumusan menunjukkan bahwa persoalan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terjadi di Dusun Kamojang memiliki hubungan yang erat sehingga memerlukan solusi yang terintegrasi. Berdasarkan hasil diskusi, disepakati bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis kelompok dan ekonomi sirkular menjadi strategi yang paling relevan untuk diterapkan.

Kesepakatan tersebut kemudian melahirkan Program KAHURIPAN (Kawasan Hijau Integrasi Pengelolaan Lingkungan) Kamojang sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan yang mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya terfragmentasi ke dalam satu ekosistem pembangunan berkelanjutan. Model ini dirancang melalui penguatan enam subprogram yang saling terhubung, yaitu pengembangan Pertanian terpadu Kelompok KWT Rengganis 76 Kamojang, Budidaya Jamur Kelompok KUM Kamojang, Budidaya dan Pengolahan Kopi KTH Gunung Kamojang, Pengolahan Sampah Kelompok Kamojang Bersih (KASIH), Pelestarian Hutan Lokal Kelompok

Budidaya Pohon Endemik, serta Pemberdayaan Pemuda Kelompok Kamojang Pesat.

Berbeda dengan pendekatan pemberdayaan konvensional yang sering kali berjalan secara sektoral, Program KAHURIPAN Kamojang dibangun melalui pendekatan integratif yang menghubungkan output dan input antar kelompok sehingga terbentuk rantai nilai ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Pendekatan ini dipandang mampu menjawab berbagai persoalan secara simultan sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya lokal.

Ketiga, tahap *prototypes* merupakan fase implementasi awal berbagai solusi yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, fokus utama program adalah menguji efektivitas model yang dikembangkan sebelum diterapkan dalam skala yang lebih luas.

Rancangan purwarupa pada tahap awal meliputi pengembangan berbagai inovasi berbasis pemanfaatan limbah secara menyeluruh, baik limbah organik maupun limbah anorganik. Limbah baglog jamur yang sebelumnya tidak bernilai mulai dimanfaatkan sebagai media tanam produktif, sementara limbah kulit kopi diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, termasuk inovasi WanaFish sebagai pakan ikan alternatif ramah lingkungan. Sementara sampah plastik ditransformasikan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, seperti eco-brick, paving block, hingga berbagai produk furniture. Inovasi ini menjadi titik penting dalam pembentukan ekonomi sirkular karena limbah tidak lagi dipandang sebagai residu yang berakhir dibuang, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali dalam proses produksi.

Inovasi lain yang dikembangkan pada tahap *prototypes* adalah konversi kendaraan pengangkut sampah berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Inovasi ini berangkat dari keterbatasan sistem pengelolaan sampah yang dihadapi masyarakat. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Desa Laksana hanya memperoleh alokasi satu unit gerobak sampah untuk

mendukung kegiatan pengumpulan sampah masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengangkutan sampah kurang optimal dan berpotensi menghambat upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Menjawab tantangan tersebut, Program KAHURIPAN Kamojang mengembangkan purwarupa kendaraan pengangkut sampah berbasis motor listrik melalui konversi kendaraan yang telah ada. Inovasi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional pengangkutan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan teknologi ramah lingkungan pada sistem pengelolaan sampah desa. Penggunaan motor listrik mampu menekan biaya operasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang selama ini menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam aktivitas pengangkutan sampah. Melalui uji coba tersebut, masyarakat memperoleh pengalaman langsung dalam mengadopsi teknologi rendah emisi yang dapat mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip ekonomi sirkular yang menjadi landasan program.

Keberhasilan berbagai purwarupa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengadopsi teknologi dan praktik baru ketika didukung oleh proses pendampingan yang memadai. Pada tahap ini, inovasi sosial mulai menunjukkan fungsinya sebagai mekanisme pembelajaran kolektif yang memungkinkan masyarakat menguji, memperbaiki, hingga menyempurnakan solusi secara bertahap sebelum dikembangkan lebih lanjut.

Keempat, tahap *sustaining* merupakan fase yang bertujuan memastikan bahwa inovasi sosial dari Program KAHURIPAN Kamojang dapat terus berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Setelah berbagai purwarupa menunjukkan hasil yang positif, fokus program bergeser pada penguatan kapasitas, pengembangan infrastruktur pendukung, serta perluasan jejaring kemitraan.

Adapun upaya penguatan kapasitas pada Program KAHURIPAN Kamojang dilakukan dengan melaksanakan berbagai pelatihan lanjutan yang mencakup pengolahan produk rimpang, pengolahan produk turunan jamur, grading kopi, pengembangan WanaFish hingga pengolahan sampah plastic menjadi paving block dan furniture. Tidak hanya pelatihan yang berfokus pada produk bernilai tambah, sejumlah pelatihan juga menasar peningkatan kapasitas kelembagaan seperti pelatihan penguatan *leadership* kelompok, manajemen usaha, hingga literasi keuangan dan pemasaran produk. Intervensi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis masyarakat tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi kelompok dalam mengelola usaha secara berkelanjutan.

Guna mendukung peningkatan kapasitas tersebut, perusahaan juga menyediakan berbagai dukungan sarana prasarana infrastruktur seperti pembangunan sekretariat dan *greenhouse*, rumah produksi berstandar BPOM, pengadaan mesin peleleh sampah, dan pemasangan instalasi panel surya. Ketersediaan infrastruktur menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan efisiensi produksi masyarakat. Rachmatsyah (2025) mengemukakan bahwa integrasi teknologi dalam pemberdayaan terbukti mampu mengatasi tantangan UMKM secara efektif melalui peningkatan literasi digital, pelatihan teknis, dan perluasan akses platform secara partisipatif.

Keberlanjutan program juga semakin diperkuat melalui perlindungan kekayaan intelektual dan legalitas usaha. Sejumlah inovasi yang terlahir dari KAHURIPAN Kamojang seperti; Inovasi Pakan WanaFish dan Konversi Motor Listrik telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sementara berbagai produk yang dihasilkan oleh kelompok juga telah difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal dan PIRT. Diantaranya adalah; 1) Sertifikasi halal brand Wanaka dari Kelompok KTH Kamojang dan P-IRT produk Kopi Bubuk dan Wanaka

Cookies, 2) Sertifikasi halal brand dari kelompok KWT Rengganis dan PIRT produk Wedang Rimpang Ratus, Wedang Jahe, Lemon Kering dan Kunyit Kering, 3) Sertifikasi halal brand dari kelompok KWT Rengganis dan PIRT produk Jahe Bubuk, Kunyit Bubuk. Kepemilikan legalitas tersebut tidak hanya memberikan jaminan kualitas produk, namun sekaligus memperluas peluang akses pasar.

Selain itu, terbentuknya sinergi multisektoral dalam program dengan berbagai pemangku kepentingan mulai dari perguruan tinggi seperti Universitas Padjajaran, institusi pemerintahan, serta pelaku usaha seperti Agradaya dan Coday Coffee Lab & Roastery menunjukkan bahwa keberlanjutan program tidak hanya bertumpu pada dukungan perusahaan. Melalui kolaborasi multipihak, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pengetahuan, pasar, teknologi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Menurut penjelasan La Harudin (2025), penguatan ekosistem pendukung bagi komunitas dapat diakselerasi melalui kolaborasi aktif multipihak yang memfasilitasi kemudahan akses modal, pembekalan pelatihan teknis, hingga penguatan jaringan distribusi pasar.

Kelima, tahap *scaling* merupakan fase pengembangan manfaat inovasi sosial Program KAHURIPAN Kamojang kepada kelompok masyarakat yang lebih luas. Pada tahap ini, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari kemampuan inovasi untuk direplikasi dan memberikan manfaat di luar kelompok sasaran awal. Tahapan *scaling* yang dicapai oleh Program KAHURIPAN pada tahun keempat (2025) ini ditandai melalui perluasan berbagai unit usaha berbasis ekonomi sirkular, pengembangan produk baru, serta peningkatan jumlah penerima manfaat. Inovasi pengelolaan sampah yang awalnya berfokus pada pengurangan timbulan sampah kemudian berkembang menjadi usaha pengolahan sampah plastik dan produk bernilai ekonomi lainnya. Sementara itu, berbagai praktik baik yang dikembangkan dalam program mulai diadopsi

oleh kelompok masyarakat lain melalui kegiatan pembelajaran dan pendampingan.

Proses *scaling* juga ditunjukkan melalui berkembangnya KAHURIPAN Kamojang sebagai *learning center* yang berfokus pada edukasi, inovasi, inkubasi usaha, serta replikasi model ekonomi sirkular. Sebagai sarana pembelajaran, KAHURIPAN Kamojang telah mengembangkan beberapa *teaching group* yang dilengkapi dengan modul pembelajaran sesuai bidang keunggulan masing-masing kelompok, seperti Modul Pertanian Terpadu (KWT Rengganis), Modul Budidaya Jamur dan Pengolahan Baglog (KUM Jamur), Modul Konservasi & Pengolahan Kopi Berkelanjutan (KTH Gunung Kamojang), serta Modul Pengelolaan Sampah & Maggot Farming (Kamojang Bersih). Fungsi *learning center* juga telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan kolaborasi yang melibatkan pihak eksternal. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pelatihan dan riset pengolahan sampah plastik di TPS3R Kamojang Bersih, serta kunjungan pembelajaran dari INPEX Jepang. Penambahan jumlah penerima manfaat Program KAHURIPAN Kamojang juga menunjukkan hal yang menarik dalam proses *scaling* yang berlangsung secara konsisten selama periode implementasi program. Berikut adalah tabel rincian perkembangan jumlah penerima manfaat.

Tabel 1. Jumlah Penerima Manfaat KAHURIPAN Kamojang

TAHUN	2023	2024	2025
Individu	15 orang	17 orang	25 orang
Kelompok	4 (66 orang)	5(73 orang)	6 (67 orang)
Masyarakat luas	200 orang	500 orang	1000 orang
Jumlah total	281 orang	590 orang	1.092 orang

Sumber: Paramitasari, 2025

Peningkatan jumlah penerima manfaat yang hampir empat kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun

menunjukkan bahwa dampak Program KAHURIPAN Kamojang telah melampaui kelompok sasaran awal dan menjangkau komunitas yang lebih luas. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan strategi perluasan jangkauan program melalui penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan jejaring kolaborasi, serta diseminasi berbagai inovasi yang dihasilkan. Hal ini sekaligus menunjukkan tingginya tingkat adaptabilitas, penerimaan, dan relevansi model inovasi sosial KAHURIPAN Kamojang dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Keenam, tahap *systemic change* merupakan tahapan akhir dalam proses inovasi sosial yang ditandai dengan terjadinya perubahan pada level sistemik. Pada fase ini, inovasi tidak lagi dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari tata kehidupan masyarakat yang memengaruhi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan secara terintegrasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan telah melampaui level individu maupun kelompok dan mulai membentuk sistem sosial baru yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada aspek sosial, Program KAHURIPAN Kamojang berhasil memperkuat kohesi sosial melalui keterlibatan enam kelompok rentan yang sebelumnya bergerak secara terpisah menjadi ekosistem kolaboratif yang saling mendukung. Selain itu, sebanyak 317 pengunjung memperoleh peningkatan pengetahuan melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan di *Learning Center*, sementara lebih dari 1.000 penerima manfaat langsung dan tidak langsung telah merasakan dampak program. Penguatan peran *local hero*, keterlibatan kelompok rentan seperti lansia dan janda, serta berkembangnya budaya gotong royong menjadi indikasi bahwa program telah mendorong terbentuknya modal sosial yang lebih kuat di tingkat komunitas.

Pada aspek ekonomi, perubahan sistemik ditunjukkan melalui terbentuknya sumber-sumber pendapatan baru yang berasal dari pemanfaatan sumber daya lokal dan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Program mampu menghasilkan pendapatan kelompok sebesar Rp250 juta per tahun, menekan biaya pakan ikan hingga Rp54 juta per tahun melalui inovasi pakan mandiri, serta meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian. Salah satu capaian yang menonjol adalah peningkatan harga jual baby buncis dari Rp5.000/kg menjadi Rp13.000/kg yang didukung oleh penerapan standar mutu dan akses pasar ekspor, dengan nilai penjualan mencapai Rp62,4 juta per tahun.

Pada aspek lingkungan hidup, perubahan sistemik ditunjukkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah dan memanfaatkan residu ekonomi sebagai sumber daya produktif. Sebelum intervensi program, timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat mencapai sekitar 47.911,5 kg per tahun untuk sampah anorganik dan 157.736,08 kg per tahun untuk sampah organik. Melalui berbagai inovasi yang dikembangkan dalam Program KAHURIPAN Kamojang, masyarakat mampu mengelola kembali sekitar 1.300 kg sampah anorganik dan 60.527,42 kg sampah organik yang sebelumnya berpotensi menjadi beban lingkungan. Capaian tersebut didukung oleh pengembangan sistem ekonomi sirkular yang menghubungkan pengelolaan sampah, budidaya maggot, pemanfaatan limbah organik, pengolahan limbah kulit kopi, serta pemanfaatan baglog jamur sebagai bahan baku produk baru.

Transformasi tersebut menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah, dari yang semula diposisikan sebagai residu yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat lingkungan. Perubahan ini juga diperkuat oleh keberhasilan program dalam mengolah 100% limbah kulit kopi, mengurangi penggunaan pupuk kimia sebesar 2,9 ton per tahun, memanfaatkan lahan produktif seluas satu hektar, serta menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar

503,86 ton CO₂eq per tahun melalui inovasi konversi motor listrik. Dengan demikian, perubahan yang terjadi tidak hanya berupa pengurangan volume sampah, tetapi juga transformasi sistem pengelolaan lingkungan menuju model yang lebih sirkular dan berkelanjutan.

Pada aspek kesejahteraan, Program KAHURIPAN Kamojang berhasil membuka ruang aktualisasi bagi kelompok yang sebelumnya kurang terlibat dalam pembangunan, khususnya bagi 25 orang lansia. Dimana lansia perempuan berperan dalam pengelolaan sampah organik yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian terpadu KWT Rengganis, sedangkan lansia laki-laki terlibat dalam pengelolaan sampah anorganik melalui Kelompok Kamojang Bersih (KASIH). Selain itu, sebanyak 25 petani perempuan dan 67 anggota kelompok masyarakat lainnya terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan, pengelolaan usaha, dan pengelolaan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan terjadinya transformasi kapasitas masyarakat dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku utama pembangunan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, akses pembelajaran melalui *Learning Center*, serta dukungan keberlanjutan kelembagaan melalui regulasi desa yang telah dibangun. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan yang terjadi tidak hanya tercermin dari aspek ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya rasa bermaknaan, peran sosial, dan kapasitas masyarakat dalam mengelola wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Berbagai perubahan tersebut menunjukkan bahwa Program KAHURIPAN Kamojang tidak hanya menghasilkan dampak pada tingkat kegiatan, tetapi telah mendorong transformasi tata kehidupan masyarakat yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan. Perubahan tersebut juga telah terlembagakan dalam sistem tata kelola lokal melalui lahirnya Peraturan Desa Laksana Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi landasan bagi keberlanjutan praktik pengelolaan lingkungan

berbasis masyarakat. Dengan demikian, inovasi sosial yang dikembangkan telah mencapai tahap *systemic change*, yaitu ketika nilai, praktik, hubungan antaraktor, serta tata kelola pengelolaan sumber daya mengalami perubahan menuju sistem yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KAHURIPAN Kamojang telah berkembang melalui enam tahapan Social Innovation Spiral, yaitu *prompts*, *proposals*, *prototypes*, *sustaining*, *scaling*, dan *systemic change*. Proses inovasi sosial diawali dengan identifikasi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat Desa Laksana, khususnya terkait keterbatasan peluang ekonomi bagi kelompok rentan, pengelolaan residu kegiatan ekonomi, serta adanya persepsi bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan merupakan dua tujuan yang saling bertentangan. Melalui pendekatan partisipatif, berbagai permasalahan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi solusi yang terintegrasi dalam Program KAHURIPAN Kamojang berbasis ekonomi sirkular.

Implementasi program menghasilkan berbagai inovasi yang tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat, tetapi juga mendorong pemanfaatan kembali sumber daya yang sebelumnya dipandang sebagai limbah. Berbagai inisiatif seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat, budidaya jamur berbasis teknologi, pemanfaatan limbah organik, penguatan kelompok usaha, pengembangan *learning center*, hingga penguatan jejaring multipihak menunjukkan bahwa inovasi sosial dapat berkembang secara berkelanjutan ketika didukung oleh kolaborasi yang kuat antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak Program KAHURIPAN Kamojang tidak hanya terjadi pada tingkat individu maupun kelompok, tetapi telah mengarah pada perubahan sistemik. Transformasi

tersebut terlihat dari perubahan paradigma masyarakat terhadap persoalan sampah, terbentuknya ekosistem ekonomi sirkular yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat, menguatnya kelembagaan lokal, serta meningkatnya partisipasi berbagai pihak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa program CSR yang dirancang melalui pendekatan inovasi sosial berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan serta mendorong pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Kota Surakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 77-88. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.44354>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2026). *Produk domestik regional bruto Kabupaten Bandung menurut lapangan usaha 2021-2025* (No. Publikasi 32040.26004). BPS Kabupaten Bandung.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2024). *Kecamatan Ibum dalam angka 2024* (No. Publikasi 32040.24018). BPS Kabupaten Bandung. <https://bandungkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/7c94caf97d40d489febfaeb9/kecamatan-ibun-dalam-angka-2024.html>
- Badan Pengelola Cekungan Bandung. (2024). *Divisi persampahan: Data pembatasan timbulan*. <https://dev-cekunganbandung.jabarprov.go.id/persampahan/>
- Caulier-Grice, J., Davies, A., Patrick, R., & Norman, W. (2012). *The Theoretical, Empirical, and Policy Foundations for*

- Building Social Innovation in Europe*. Brussels: The Young Foundation.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. (2026). *Potensi timbulan sampah* [Dataset]. Portal Satu Data Kabupaten Bandung. <https://satudata.bandungkab.go.id/dataset/DLH/potensi-timbulan-sampah>
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. (2025). *Jumlah penanganan sampah* [Dataset]. Portal Satu Data Kabupaten Bandung. <https://satudata.bandungkab.go.id/dataset/DLH/jumlah-penanganan-sampah>
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. (2023). *Perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2023* [Dokumen]. Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Gunawan, W., & Sutrisno, B. (2021). Pemetaan sosial untuk perencanaan pembangunan masyarakat. *Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 2(2), 94-105. <https://doi.org/10.24198/sawala.v2i2.32761>
- Hayati, E., dkk. (2020). PT Pertamina Geothermal Energy.
- Irwansyah, dkk. (2024). *Pemetaan sosial PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang: Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung* [Laporan]. PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang.
- Kecamatan Ibum. (2025). *Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan* [Dataset]. Portal Satu Data Kabupaten Bandung. <https://satudata.bandungkab.go.id/dataset/LBUN/jumlah-peserta-sosialisasi-kebijakan-pengelolaan-persampahan>
- La Harudin. (2025). *Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Perspektif Inovasi, Kolaborasi, dan Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa Dan Akademisi*, 1(4), 33-45. <https://doi.org/10.64690/intelektual.v1i4.319>
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). *Efektivitas sosialisasi sebagai pendekatan partisipatif dalam program sosial: Tinjauan sistematis literatur*. *Share: Social Work Journal*, 15(1), 35-47.
- Paramitasari, A. (2025). *Dokumen Inovasi Sosial 2025*. Bandung: PT PLN Indonesia Power PLTP Kamojang - Darajat.
- Rachmatsyah, T. H. (2025). *Pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi untuk optimalisasi UMKM sebagai pilar utama ekonomi Indonesia*. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(1), 164-173. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v8i1.4733>
- Widagdhaprasana, M. (2025). *Laporan Rapid Environmental Assessment (REA) in Disaster PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang*. Yogyakarta: Social Development Studies Center (SODEC) UGM.
- Yayasan Get Plastic Indonesia. (2025). *Assessment Waste Management: Dusun Kamojang Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung*. Bali: Get Plastic Foundation Indonesia.